

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi pemerintah kabupaten pesawaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS) yaitu *software Smart PLS* versi 3.0. Berdasarkan hasil pengujian, variabel ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi. Sedangkan variabel pengendalian internal, keadilan distributif, dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dampaknya terhadap akuntabilitas organisasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pesawaran
2. Adanya perbedaan pemahaman responden tentang indikator pertanyaan kuesioner.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, maka peneliti mengharapkan saran – saran berikut ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya :

1. Untuk penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan akuntabilitas organisasi.
2. Bagi pegawai dinas di Kabupaten Pesawaran diharapkan untuk meningkatkan komitmen terhadap instansi. Memahami bahwa pegawai bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan publik atau masyarakat.
3. Bagi instansi dinas di Kabupaten Pesawaran diharapkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas untuk setiap pelanggaran peraturan oleh semua lapisan pegawai baik atasan maupun bawahan seperti dilakukannya pemotongan gaji.